

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN,
AKSESIBILITAS, DAN PERAN PERANGKAT DESA
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Muntilan)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Ely Ayuning Astuty
NPM. 14.0102.0103

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN,
AKSESIBILITAS, DAN PERAN PERANGKAT DESA
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Muntilan)**

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun Oleh:
Ely Ayuning Astuty
NIM : 14.0102.0103

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ely Ayuning Astuty

NIM : 14.0102.0103

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

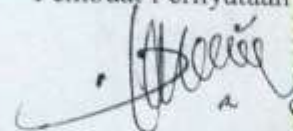
**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN, AKSESIBILITAS, DAN PERAN PERANGKAT
DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA
(Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Muntilan)**

adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 26 Januari 2019

Pembuat Pernyataan



Ely Ayuning Astuty

NIM. 14.0102.0103



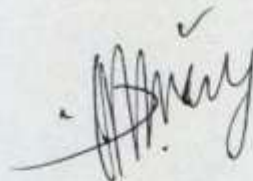
RIWAYAT HIDUP

Nama : Ely Ayuning Astuty
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 07 Oktober 1996
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jetis RT 01/RW 09 Ngawen, Muntilan
Magelang
Alamat Email : elyayuning07@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar(2002-2008) : SD Negeri Ngawen 1
SMP(2008-2011) : MTs Ma'arif 2 Muntilan
SMA(2011-2014) : SMA Negeri 1 Ngluwar
Perguruan Tinggi (2014-2019) : S1 Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Magelang

Magelang, 26 Januari 2019
Peneliti



Ely Ayuning Astuty
NIM. 14.0102.0103

MOTTO

“Apabila kamu telah membulatkan tekad,
maka bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”
(QS 3: 159)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada
Tuhanmulah engkau berharap.”
(QS. Al-Insyirah,6-8)

"Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar"
(Al-Baqarah:153)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN DESA (Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Muntilan)**”.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu

penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dra. Marlina Kurnia, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc, AK selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Vevi Soraya Dewi S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan ketulusan hati telah memberikan arahan, bimbingan, kritik, dan saran terhadap perbaikan skripsi.
5. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
6. Keluarga tercinta yang telah memberikan keceriaan, semangat dan doa.
7. Para perangkat Desa se Kecamatan Muntilan atas kesediaannya sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Magelang, 26 Januari 2019
Peneliti

Ely Ayuning Astuty
NIM. 14.0102.0103

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan Keaslian.....	iii
Riwayat Hidup	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran	xi
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
A. Telaah Teori.....	11
B. Telaah Penelitian terdahulu	19
C. Perumusan Hipotesis	21
D. Model Penelitian.....	28
BAB III METODA PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel.....	29
B. Data Penelitian.....	30
C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	31
D. Metoda Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian	38
B. Statistik Deskriptif Responden	38
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	39
D. Uji Validitas Data	42
E. Analisis Regresi Linier Berganda.....	44
F. Uji Hipotesis	45
G. Pembahasan	51

BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	57
B. Keterbatasan Penelitian	58
C. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian.....	39
Tabel 4.2 Profil Responden.....	40
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Data Penelitian.....	41
Tabel 4.4 <i>Cross Loading</i> Pengujian Validitas	44
Tabel 4.5 Pengujian Reliabilitas	46
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	46
Tabel 4.7 Nilai Koefisien Determinasi.....	47
Tabel 4.8 Uji F	48
Tabel 4.9 Uji t	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	28
Gambar 3.1 Uji F	36
Gambar 3.2 Uji t.....	37
Gambar 4.1 Uji F	46
Gambar 4.2 Penerimaan Hipotesis Kompetensi Aparatur	48
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis Sistem Pengendalian Internal	48
Gambar 4.4 Penerimaan Hipotesis Penyajian Laporan Keuangan.....	49
Gambar 4.5 Penerimaan Hipotesis Aksesibilitas	50
Gambar 4.6 Peran Perangkat Desa	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner.....	63
Lampiran 2 Penyebaran Kuisisioner.....	71
Lampiran 3 Tabulasi Data	72
Lampiran 4 <i>Output SPSS</i>	83
Lampiran 5 Pengujian CFA	93

ABSTRAK

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS,
DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Muntilan)**

**Oleh :
Ely Ayuning Astuty**

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur, Sistem Pengendalian Internal, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Muntilan. Teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu populasi yang memenuhi kriteria sampel sesuai dengan yang diperoleh sampel sebanyak 68 responden. Hasil penelitian membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

***Kata Kunci : Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal,
Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Peran Perangkat
Desa, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa.

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders*. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat. Di sektor privat, akuntabilitas akan muncul secara otomatis apabila entitas telah atau dalam proses melakukan penerbitan efek di pasar modal dan entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat (Narsa dan Isnalita 2017). Berbeda dengan sektor privat, akuntabilitas di sektor publik merupakan suatu hal yang sudah pasti akan muncul. Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai sangat penting untuk dimiliki disebabkan adanya akuntabilitas tersebut akan

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka setiap kabupaten/kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Alokasi APBN sebesar 10%, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban ini berpedoman pada Permen No 113 tahun 2014. Peraturan Mendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa. Berdasarkan data yang diperoleh pemerintah menaikkan Alokasi Dana Desa dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Pada tahun 2015 Pemerintah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp 20,76 triliun. Pada tahun 2016, Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan sebesar 125,91% menjadi Rp 46,9 triliun, dan naik lagi pada tahun 2017 mencapai Rp 60 triliun. Dengan adanya Dana Desa yang jumlahnya sangat besar tersebut, maka akan sangat rawan untuk terjadinya penyelewengan atau korupsi atas Dana Desa yang telah diberikan kepada aparat pemerintah desa.

Sri Mulyani menambahkan, penyaluran dana desa untuk 2018 berbeda dengan sebelumnya karena desa yang tertinggal akan mendapatkan dana desa lebih besar dibandingkan desa yang lebih maju. Desa nantinya bisa mendapatkan dana desa dari Rp 800 juta hingga Rp 3,5 milyar. Beliau berharap para kepala desa bisa membuat program-program untuk pengentasan kemiskinan. Kepala desa bisa belajar ke desa yang telah maju dan mampu mengelola dana desa dan hasilnya mampu menyejahterakan rakyat.

Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (www.antikorupsi.org) terdapat 110 kasus yang berhubungan dengan penyelewengan Dana Desa sepanjang 2016–10 Agustus 2017. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan oleh Kepala Desa. Selain itu, pelaku korupsi lainnya adalah 30 perangkat desa dan istri kepala desa sebanyak 2 orang. Dari 110 kasus tersebut, jumlah kerugian negara mencapai Rp 30 miliar. Adapun sejumlah bentuk korupsi yang termasuk penyalahgunaan Dana Desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan

wewenang, pungutan liar, *mark up* anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap. Terdapat 5 titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan Dana Desa yaitu dari proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, *monitoring* dan evaluasi, pelaksanaan, dan pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan Dana Desa.

Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan dengan 372 desa dan semuanya mendapatkan dana desa kecuali 2 kelurahan yaitu Kelurahan Sumberejo dan Kelurahan Sawitan. Dibawah ini rincian dana desa per kecamatan di Kabupaten Magelang tahun 2018.

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Besaran dana
1	Kajoran	22.632.111.000
2	Grabag	22.330.204.000
3	Tegalrejo	16.116.194.000
4	Kaliangkrik	16.090.053.000
5	Pakis	15.947.180.000
6	Windusari	15.934.873.000
7	Salaman	15.859.241.000
8	Borobudur	15.659.696.000
9	Secang	14.943.900.000
10	Candimulyo	14.869.864.000
11	Srumbung	13.175.805.000
12	Ngablak	12.576.628.000
13	Sawangan	11.985.140.000
14	Tempuran	11.902.620.000
15	Dukun	11.680.921.000
16	Bandongan	11.275.453.000
17	Mungkid	11.069.661.000
18	Muntilan	10.251.655.000
19	Mertoyudan	9.733.870.000
20	Salam	9.311.645.000
21	Ngluwar	6.266.185.000
	Jumlah	289.612.899.000

Sumber : Peraturan Bupati Magelang nomor 8 tahun 2018

Pemerintah melakukan perubahan formulasi dalam distribusi dana desa 2018. Jika sebelumnya faktor pemerataan sangat dominan sebagai pertimbangan pengalokasian dana desa tetapi saat ini lebih di fokuskan pada keterlambatan ekonomi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi sejak dini terhadap indikasi adanya perlambatan ekonomi di tengah masyarakat. Kecamatan Muntilan dalam pengalokasian dana desa nya tidak semua digunakan untuk pembangunan. Dana desa di alokasikan 60% untuk infrastruktur desa dan 40% untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan kucuran dana yang cukup besar ini, diharapkan tingkat kemiskinan akan menurun secara cepat. Adapun anggaran Dana Desa yang dikucurkan pemerintah di kecamatan Muntilan untuk setiap desa nya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rincian Dana Desa Kecamatan Muntilan

No.	Desa	Alokasi Dana Desa	Realisasi Dana Desa
1.	Tanjung	718.423.000	102.078.000
2.	Sokorini	842.465.000	226.120.000
3.	Sriwedari	798.852.000	182.507.000
4.	Congkrang	801.424.000	185.079.000
5.	Adikarto	870.986.000	254.641.000
6.	Menayu	794.041.000	177.696.000
7.	Keji	917.311.000	300.966.000
8.	Ngawen	819.771.000	203.426.000
9.	Gunungpring	915.409.000	299.064.000
10.	Pucungrejo	818.457.000	202.112.000
11.	Tamanagung	899.939.000	283.594.000
12.	Gondosuli	819.811.000	203.466.000
13.	Sedayu	895.440.000	279.095.000

Sumber : Peraturan Bupati Magelang nomor 8 tahun 2018

Berdasarkan kucuran dana yang cukup besar ini, diharapkan tingkat kemiskinan akan menurun secara cepat. Dana desa in di realisasi dalam hal pemberdaya ekonomi masyarakat di Desa Ngawen Kecamatan Muntilan.

Pemanfaatan dana desa dialokasikan pada Warung Kuliner Desa Ngawen. Di desa ngawen pengalokasian dana desa 60% di gunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, dan bumi perkemahan. Kemudian 40% nya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, diantaranya seperti kesehatan (posyandu), pengembangan wisata, dan ekonomi masyarakat. Dalam pembangunan ini menghabiskan dana sebesar Rp 130 juta. Pembangunan warung kuliner tersebut dilakukan secara swakelola oleh 8-10 pekerja dari masyarakat lokal dan bertujuan, sebagai tempat kuliner wisatawan yang berkunjung di Candi Ngawen. Namun, pengelolaan warung tersebut tidak transparan dan pengelolaan warung bukan dari warga sekitar yang masih menganggur. Tetapi dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Selain itu juga, dari segi pemasaran kurang efektif karena tidak strategis letaknya, sehingga warung tersebut menjadi sepi dari pelanggan (<http://kecamatanmuntilan.magelangkab.go.id/>).

Menurut Rudana (2005:6), kompetensi merujuk kepada pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skills*) dan kemampuan (*abilities*), yang dapat didemonstrasikan yang dilakukan dengan standar tertentu. Kompetensi aparatur ini sangat mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa, dengan adanya kompetensi aparatur akan menjadi kontrol dalam mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Widyatama (2017) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh Mada (2017) yang menunjukkan

bahwa kompetensi aparat pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain kompensasi yang terlaksana dengan baik, pengelolaan dana desa juga memerlukan adanya Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi”. Dengan adanya Sistem Pengendalian Internal dapat memengaruhi pengambilan keputusan Internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan oleh Yudiantoro (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Widyatama, 2017) tentang Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). **Persamaan** penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama (2017) adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain: **Pertama**, penelitian ini terdapat penambahan variabel penyajian laporan keuangan. Penambahan variabel penyajian laporan keuangan ini karena dapat memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik, dan juga laporan keuangan (Rohman, 2009). Dalam organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat melalui laporan keuangannya. Penyajian laporan keuangan ini sangat penting, ketika suatu pemerintah menyajikan laporan keuangan secara baik maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat.

Kedua, penambahan variabel aksesibilitas. Penambahan variabel Aksesibilitas akan memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Ketika tingkat aksesibilitas tinggi maka akuntabilitas menjadi efektif dan dapat menghasilkan laporan keuangan bersifat transparan dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketiga, penelitian ini menambahkan variabel peran perangkat desa. Perangkat desa sebagai salah satu unsur perilaku desa yang memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Dengan adanya perangkat desa yang baik pada setiap aparaturnya pemerintah dapat membantu dalam memantau penggunaan dana desa. Penambahan

tersebut mengacu pada penelitian Indianasari (2017) tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa karangsari kecamatan Sukodono). **Keempat**, penelitian ini akan dilakukan pada desa-desa se-Kecamatan Muntilan. Sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di kabupaten Sigi.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa ?
2. Apakah terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa?
4. Apakah terdapat pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa ?
5. Apakah terdapat pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa ?
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa ?

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa ?
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh aksesibilitas terhadap terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa ?
5. Untuk menguji secara empiris Peran Perangkat Desa terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa ?

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti atas bukti empiris yang diperoleh dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas Pemerintah desa dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Manfaat praktis:

Bagi Pemerintah Desa diKabupaten Magelang, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agents*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberi mandat kepada pihak lain yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agents*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka agen diyakini akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan *principal* (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori Agensi sebenarnya telah dipraktikkan, organisasi sektor publik yang dimaksud *principal* adalah Pemerintah dan masyarakat serta *agents* dalam hal ini adalah perangkat desa. Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi mengelola keuangan dana desa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan transparan dan akuntabel.

2. Kompetensi

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang para *outstanding performers* lakukan lebih sering pada lebih banyak situasi dengan hasil yang lebih baik, daripada apa yang dilakukan *average performers* (Sagala 2009). Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari seorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif (Spencer, 1993:9). Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, ketrampilan, kemampuan.

Kompetensi dapat diperoleh melalui belajar. Kegiatan belajar memungkinkan individu memperoleh berbagai kognisi atau pengertian, kecakapan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Bagi masyarakat, belajar memainkan peranan penting, terutama dalam meneruskan kompetensi dan kebudayaan pada generasi penerus. Lingkungan dapat menjadi sumber kompetensi yang sangat luas bagi individu selama individu tersebut mau memanfaatkan energi pikirannya terhadap hal-hal yang ditemui di lingkungan. Dengan demikian pada dasarnya kompetensi itu muncul dan berkembang melalui proses belajar dan melibatkan tiga domain yaitu: domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor.

3. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan”. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah: untuk memberi keyakinan yang memadai tentang; kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Internal.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aparat Pegawai Instansi Pemerintah sebagai salah satu sarana pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah

(SPIP) menyatakan bahwa SPIP memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Bastian, 2006).

Menurut Wahidah penyajian Laporan Keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Terdapat 4 indikator karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Tanjung (2008: 11-12) mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki

oleh pihak pengguna laporan keuangan seperti yang tertera di bawah ini:

- a. **Relevan:** Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
- b. **Andal:** Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
- c. **Dapat dibandingkan:** Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara Internal dan eksternal. Perbandingan secara Internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
- d. **Dapat dipahami:** Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Sedangkan menurut Belkaoui (2006: 221) karakteristik kualitatif dari laporan keuangan adalah relevansi dan materialitas, bentuk dan substansi, keandalan, kebebasan dari bias, komparabilitas, konsistensi, dan dapat dimengerti. Dari karakteristik tersebut dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan hendaknya sebagian besar didasarkan pada kebutuhan para pengguna laporan. Informasi hendaknya sejauh mungkin bebas dari bias pembuatnya. Dalam melakukan pengambilan keputusan, para pengguna hendaknya tidak hanya memahami informasi yang disajikan, namun juga hendaknya mampu menilai keandalannya dan membandingkannya dengan informasi mengenai peluang-peluang alternatif dan pengalaman sebelumnya.

5. Aksesibilitas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1999: 19) arti dari kata aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Menurut Rohman (2009) Aksesibilitas jika dilihat dari perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan

untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Menurut Mustofa (2012) aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa aksesibilitas terkait erat dengan kemudahan dan ketersediaan.

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang efektif.

Menurut Hehanussa (2015) aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. Menurut Apriliani, dkk., (2015) aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah. Sedangkan Menurut Mustofa (2012) aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan mewujudkan hubungan yang baik pula antara publik dan pemerintah. Maka dari itu, suatu pemerintah daerah hendaknya meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, serta memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh

informasi dengan mudah. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya tidak sekedar hanya menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak DPRD saja akan tetapi memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

6. Peran Perangkat Desa

a. Struktur Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

b. Peran Perangkat Desa

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsure pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan

mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralistis.

7. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya.

B. Telaah Penelitian terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Aulia (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota	Kompetensi Pengelola Dana Desa, Komitmen Pemerintah Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2.	Akib (2017)	Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa	Perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
3.	Widyatama (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa	Kompetensi Pengelola Dana Desa, Komitmen Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa
4.	Yudianto (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
5.	Sarifudin (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Desa, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6.	Indrianasari (2017)	Pengaruh peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Variabel perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
7.	Nurlaili (2016)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penyajian Laporan Keu. dan Aksesibilitas Berpengaruh Positif terhadap Transparansi & Akuntabilitas D3Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
8.	Saragih (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun.	Variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
9.	Wahyuni (2016)	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2019

C. Perumusan Hipotesis

1. Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Robbins (2007:38) bahwa kompetensi aparatur adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kompetensi dapat diperoleh melalui belajar. Kegiatan belajar memungkinkan individu memperoleh berbagai kognisi atau pengertian, kecakapan, keterampilan, serta sikap dan perilaku.

Berdasarkan teori keagenan (*Jensen dan Mecking, 1976*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*)

memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*.

Diasumsikan bahwa setiap individu memiliki perbedaan kepentingan dan akan mengutamakan kualitas masing-masing individu untuk memaksimalkan apa yang mejadi kepentingan individu. Dengan adanya asimetri informasi, maka dapat mendorong agen untuk bertindak tidak terbuka dan kurang bertanggungjawab atas wewenang yang dimiliki.

Untuk mengurangi konflik keagenan tersebut maka perlu adanya kompetensi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan dan konflik dalam keagenan bisa teratasi. Semakin baik kompetensi aparatur maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Hal ini di dukung oleh Penelitian Sarifudin et al, (2017) dan Aulia (2018) menunjukkan bahwa kompetensi Aparatur dari Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa

2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan Aparat Pegawai Instansi Pemerintah sebagai salah satu sarana pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa SPIP memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Teori agensi pihak *principal* adalah pihak yang memberi mandat kepada pihak lain yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Penyimpangan dan kebocoran masih banyak ditemukan di dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dibutuhkan untuk meminimalkan adanya kecurangan dalam suatu sistem. Sistem Pengendalian Internal dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dengan

menerapkan Sistem Pengendalian Internal maka dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka semakin baik Akutabilitas pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyatama, et al (2017) dan Yudiantoro (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Aparatur dari Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

3. Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009: 159). Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan

transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2016).

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agents*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang untuk membuat keputusan. Ketika suatu organisasi menyajikan laporan keuangan secara baik dan benar maka nantinya akan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik penyajian laporan keuangan akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah, karena semua transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan secara lengkap dan jujur. Penyajian laporan keuangan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokai Dana Desa (ADD) sehingga seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan dan konflik dapat teratasi. Semakin baik Penyajian Laporan Keuangan maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian Nurlaili et al (2016) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu penelitian Saragih (2015) juga menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H3. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

4. Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang efektif. Akuntabilitas dapat memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder*.

Dalam teori agensi pihak *principal* adalah pihak yang memberi mandat kepada pihak lain yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pemerintah desa harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan dan masyarakat. Akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (Internalet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004).

Penelitian Nurlaili et al (2016) menunjukkan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Saragih (2015) aksesibilitas berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan dan desa. Dan Wahyuni (2014) juga menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H4. Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

5. Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain kepala desa, sesuai rumusan pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Jenis, kedudukan, dan tugas perangkat desa disebut dalam pasal 48 dan 49 dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007:10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut.

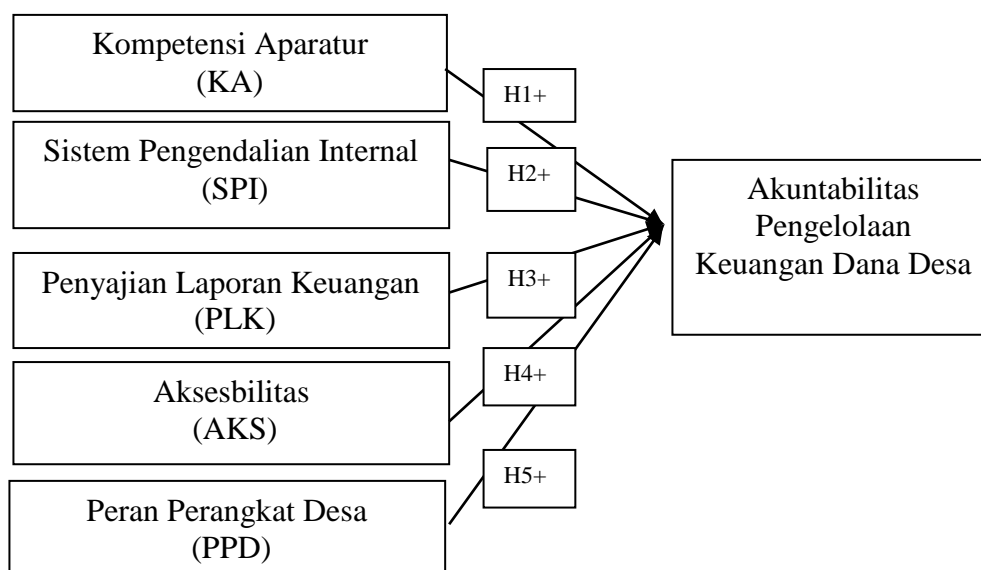
Berdasarkan penjelasan dari teori agensi, bahwa *principal* itu dapat memberikan wewenang atas tanggungjawab segala aktivitasnya kepada agent, dalam hal ini adalah aparatur desa. Peran perangkat desa yang baik

akan mengurangi kecurangan pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan perangkat desa secara maksimal mengerjakan tugas maupun tanggung jawab.

Penelitian ini megacu pada pada penelitian Indrianasari (2017) dan Akib (2017) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa pada desa Karangasari kecamatan Sukodono. Dengan hasil hipotesis:

H5. Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah atau komunitas yang terdiri atas objek subjek yang dimiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:23). Populasi dalam penelitian ini adalah Desa se-Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang yaitu sebanyak 13 Desa di Kecamatan Muntilan yang mendapatkan dana desa. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan, kasi pelayanan dan kasi kesra.
2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2012).

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survey, yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarkan dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner tentang hal itu. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Peneliti memilih cara demikian dengan pertimbangan bahwa metode survey langsung lebih efektif dan mengurangi risiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran variabel

No.	Variabel	Definisi	Pengukuran
1.	Akuntabilitas (AKPDD)	Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada <i>shareholders</i> (Mardiasmo, 2006).	Instrumen 5 dengan indikator perumusan rencana keuangan, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, pelaksanaan pelaporan keuangan dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa. Diukur dengan menggunakan skala likert 1- 5 (Sande 2013).
2.	Kompetesi Aparatur (KA)	Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasari seorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria kinerja yang efektif (Spencer, 1993:9).	Terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur Kompetensi aparatur yaitu pengetahuan, kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian teknis, kemampuan mencari solusi, inisiatif dalam bekerja, dan keramahan serta kesopanan. Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 (Roviyantie 2012).
3.	Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Sistem Pengendalian Internal (SPI) ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008.	Terdapat 5 indikator dari yang digunakan untuk mengukur Sistem Pengendalian Internal yang telah dipraktikan dilingkungan pemerintahan di berbagai negara yang meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi
4.	Penyajian Laporan Keuangan (PLK)	Penyajian Laporan Keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK 1, 2012).	Terdapat indikator dari Peggy Sande (2013) yang digunakan untuk mengukur penyajian laporan keuangan yaitu relevan, andal,.

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran variabel
(Lanjutan)

No.	Variabel	Definisi	Pengukuran
5.	Aksesibilitas (AKS)	Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah (Mustofa 2012).	dapat dibandingkan, dan dapat dipahami dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa ini, yang di adopsi dari penelitian Terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur kemudahan masyarakat mendapatkan informasi yaitu terbuka dimedia massa, mudah diakses, ketersediaan informasi. Variabel ini diukur dengan skala likert 1- 5 (Nurmuthmainnah, 2015).
6.	Peran Perangkat Desa (PPD)	Peran perangkat desa yaitu bagaimana keterlibatan perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada didesa tersebut (Gunawan,. 2013).	Terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur peran perangkat desa adalah keterlibatan dalam perencanaan, keterlibatan dalam penggunaan, keterlibatan dalam penyusunan RAB, keterlibatan dalam masukan dan pendapat APB Desa. Variabel ini diukur dengan skala likert 1- 5 (Menurut Indrianasari, 2017).

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2019

D. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif dalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud menarik kesimpulan (Sugiyono, 2010:147). Pengujian dengan menggunakan statistik

deskriptif dapat mengetahui nilai mean, distribusi frekuensi, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi masing-masing variabel independen. Sehingga dapat memberikan hasil deskripsi mengenai variabel yang ada dalam penelitian.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

CFA atau disebut juga *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji validitas suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Uji validitas adalah salah satu cara untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian (atau juga dikenal dengan item pertanyaan kuesioner) mengukur dengan tepat atau benar apa yang hendak diukur.

CFA merupakan cara untuk menguji variabel terukur mewakili konstruk (konsep yang dapat diamati dan diukur). CFA biasa digunakan peneliti untuk menolak atau menerima hipotesis. Untuk melihat nilai loading significant dari CFA, dapat dilihat dari nilai kritis (*critical ratio*) yang dihasilkan. Nilai kritis merupakan sebuah nilai dari uji statistik (*t-test dan f-test*) yang menunjukkan sebuah tingkat signifikan tertentu. Apabila nilai kritis lebih besar dari 1,96, maka terdapat signifikansi dengan tingkat kepercayaan 95% (Hair *et al*, 2010:441).

Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser-*

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor dan *cross loading* $> 0,50$ untuk menentukan kevalidan dari setiap item pernyataan.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama (Ghozali, 2013: 47). Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian untuk menilai sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung *croanbach's alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel, instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal/reliabel jika memberikan nilai *croanbach's alpha* lebih dari 0,70.

3. Analisis Linier Berganda

Regresi berganda adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dependen dan beberapa variabel independen.

$$AKPDD = \alpha + \beta KA + \beta SPI + \beta PLK + \beta AKS + \beta PPD + \varepsilon$$

Keterangan :

AKPDD = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

β = Koefisien Regresi dari X

KA = Kompetensi Aparatur

SPI = Sistem Pengendalian Internal

PLK = Penyajian Laporan Keuangan

AKS = Aksesibilitas

PPD = Peran Perangkat Desa

E = Nilai Error

4. Pengujian Hipotesis

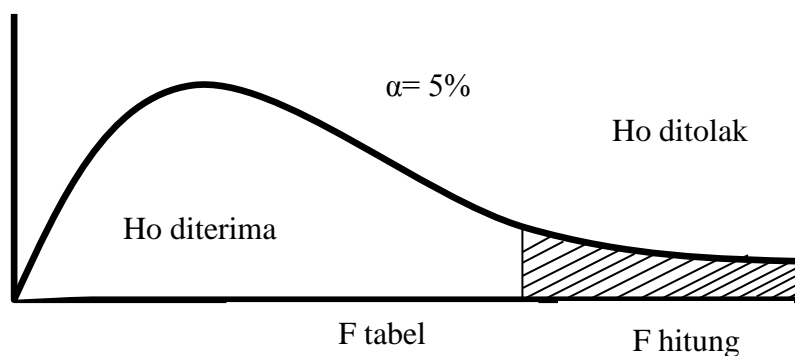
a. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2013: 97). Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu Kompetensi aparatur, SPI, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Peran perangkat desa, terhadap variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Besarnya koefisien 0 sampai 1, semakin mendekati 0 koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2016:19).

b. Uji F (*Goodness of fit test*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2016:97). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pemilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut ($df = n-k-1$) dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- 1). Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $P\ value < \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
- 2). Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $P\ value > \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (*tidak fit*).

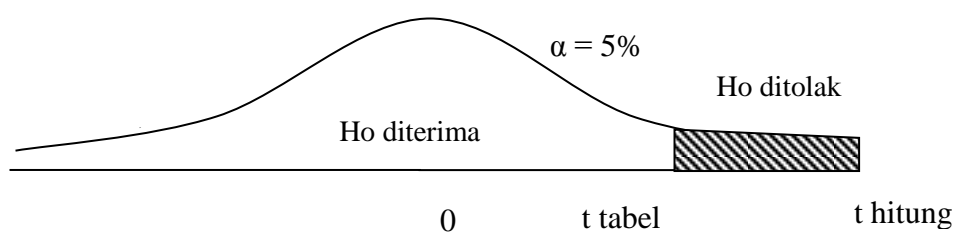


Gambar 3.2
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho (Uji F)

c. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independendalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2016:97).

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $P\ value < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $P\ value > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima berarti variabel independen tidak mempunyaipengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Hipotesis Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang meliputi Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan peran perangkat desa. Penelitian ini dilakukan di desa se-Kecamatan Muntilan, dengan responden Kades, Sekdes, Bendahara, Kasi, dan Kaur desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan 68 kuisioner yang dapat diolah.

Hasil *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Peran Perangkat Desa mampu menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 39,9%.

Hasil uji t menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Kompetensi Aparatur, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Dan Peran Perangkat Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa se-Kecamatan Muntilan.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya dilakukan dengan mengambil sampel di desa se-Kecamatan Muntilan.
2. Penelitian ini hanya meneliti variabel Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Peran perangkat Desa.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama dengan menambahkan atau menggunakan objek atau lokasi yang berbeda.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, seperti variabel Transparansi dan Sumber Daya Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M., Nurnaluri, S., & Sutrawati, K. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Apriliani, Ni Kadek Alit, Edy Sujana dan Gede Adi Yuniarta. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik *Kualitatif*, dan *Aksesibilitas* Terhadap Transpa ransi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung. *Jurnal Riset Akuntansi Indoneisa*. Vol. 3 No1.Bali:Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Aulia, P., Agusti, R., & Julita, J. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota (Studi Empiris Pada Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Dan Kecamatan Kapur IX). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1-15.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Edisi Ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanto, *Sahmuddin*, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indonesian Corruption Watch. 2018. <http://www.antikorupsi.org/news/122-kepala-desa-jadi-tersangka-korupsi>.
- Ivan,Yudianto.,dan Ekasari, Sugiarti. 2017. *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)*. Universitas Padjadjaran.
- Jensen dan Meckling. 1976. The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour,Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economic*, 3:305-360.

- KPK. 2018. KPK Temukan 14 Potensi Pesorsoalan Pengelolaan Dana Desa. <http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2731-kpk-temukan-14-potensi-persoalan-pengelolaan-dana-desa>.
- Mada, S., Kalagi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 8(2).
- Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Ofsett.
- Mustofa, Anies Iqbal. 2012. Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Narsa, N. P. D. R. H. N., dan Isnalita. 2017. SAK-ETAP Sebagai Solusi Overload Standar Akuntansi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. *Ekuitas*, 1 (1): 44-65.
- Nurlaili. 2016. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkulu) Effect Of Financial Statements Presentation Of Financial Statements And Accessibility Of Region." *JOM Fekon* 3(1).
- Nurmuthmainnah, Wahida. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- _____. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

- _____. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014*.
- _____. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- _____. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa*.
- _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010*.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Pasal 68 Ayat 1 Huruf C tentang *Desa Tahun 2005*.
- Rohman, Abdul. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemda Di Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi & Bisnis* Vol. 9 No1 ISSN 1412-0852.
- Robbins, S. P. 2007. *Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks . Gramedia. Edisi Kesepuluh.
- Rudana, N. 2005. Pengaruh Kompetensi Aparatur PEMDA dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Diponegoro.
- Riyansa, Ridho, Yunilma dan Fauziati Poppy. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*.
- Sagala, R. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Rajawali Pers.
- Sande, Peggy. 2013. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*. Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA.
- Saragih, C. A., Ratnawati, V., & Hanif, R. A. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 2(2), 1-16.

- Sarifudin, Lintje, dan Hendrik. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Sam Ratulangi.
- Spencer, Lyle & Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work, Models For Superior Performance*. Canada : John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- _____. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahyuni, Putu Sri, Sulindawati, Ni Luh Gede Erni, dan Herawati Nyoman Trisna. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung). *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. 2(1).
- Widyatama, A., L. Novita., dan Diarespati. 2017. *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 02, No. 02 (2017):1-20.
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 17(1).